

Determinan Tata Kelola, Audit, Whistleblowing, dan Kompetensi SDM Terhadap Pencegahan Fraud BOS

Giska Putri Utami ^{1*}, Tutut Dewi Astuti ²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: Giska Putri Utami  giskaputriu@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dari kuesioner yang disebarakan kepada 48 responden (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah) pada 12 SD, dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi SDM masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, baik secara parsial maupun simultan, dengan kemampuan model menjelaskan 87,3% variasi pencegahan fraud ($\text{Adjusted } R^2=0,873$). Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola, audit proaktif, saluran pelaporan yang aman, dan kompetensi pengelola secara bersamaan diperlukan untuk menekan risiko kecurangan dana pendidikan di daerah terpencil.

Abstract: This study analyzes the effect of Good Governance, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System, and Human Resource Competence on fraud prevention in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at primary schools in southwest Sumba Regency, NTT. A quantitative method was used with primary data collected through questionnaires distributed to 48 respondents (Principals, Vice Principals, BOS Treasurers, and School Committees) across 12 schools, analyzed using multiple linear regression with SPSS 29. The results show that Good Governance, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing System, and HR Competence each have a positive and significant effect on fraud prevention, both partially and simultaneously, with the model explaining 87.3% of the variance in fraud prevention ($\text{Adjusted } R^2=0,873$). These findings confirm that strengthening good governance, proactive auditing, safe reporting channels, and manager competence are jointly required to reduce the risk of fraud in education funding in remote areas.

Artikel Hostori

Direvisi: 13-08-2026

Diterima: 07-09-2026

Diterbitkan: 15-09-2026

Kata Kunci:

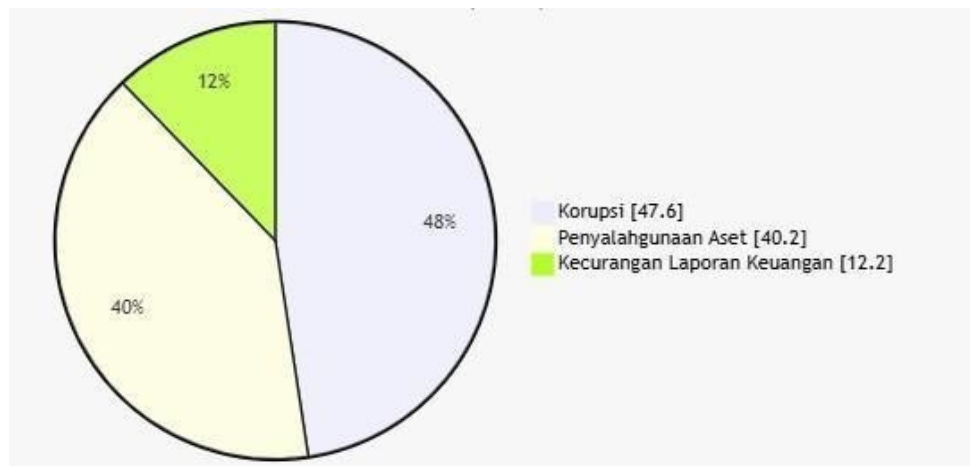
Good Governance;
Fraud Audit Proaktif;
Sistem Whistleblowing;
Kompetensi Sumber
Daya Manusia;
Pencegahan Fraud;
Dana BOS

Keywords:

Good Governance;
Proactive Fraud Audit;
Whistleblowing System;
Human Resource
Competence; School
Operational Assistance
Fund

PENDAHULUAN

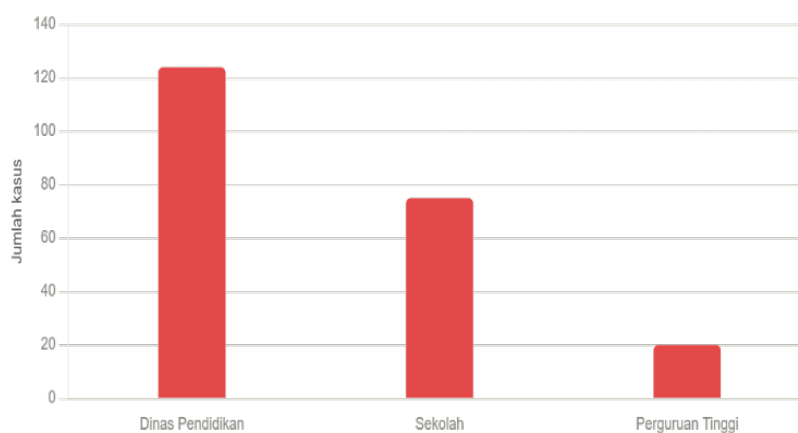
Fraud atau kecurangan merupakan permasalahan serius yang mengancam integritas tata kelola keuangan publik di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi di seluruh dunia kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat tindakan kecurangan, dengan sektor pemerintahan menjadi yang paling terdampak, mencapai 15% dari keseluruhan kasus fraud yang terdeteksi secara global. Tiga bentuk fraud yang paling dominan meliputi korupsi (47,6%), penyalahgunaan aset (40,2%), dan kecurangan laporan keuangan (12,2%) (ACFE Indonesia, 2025).



Gambar 1. Grafik Komposisi Jenis *Fraud* (2025)

Sumber: <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2025/>
(Survei *Fraud* Indonesia 2025)

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan fraud di sektor publik, dengan sektor pemerintahan konsisten menempati posisi tertinggi sebagai entitas yang paling rentan terhadap kecurangan (ACFE Indonesia, 2025). Sektor pendidikan turut tidak luput daripada permasalahan ini. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (Indonesia Corruption Watch, 2021), terdapat 240 kasus korupsi disektor pendidikan dengan 157 tersangka di antaranya berasal dari pihak sekolah secara langsung, dari total 621 tersangka dan estimasi kerugian negara sekitar Rp1,6 triliun. Bentuk penyimpangan yang paling umum mencakup penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), manipulasi laporan keuangan, serta penyalahgunaan aset sekolah (Nasution et al., 2026).



Gambar 2. Grafik Jumlah Kasus Korupsi Pendidikan Berdasarkan Instansi Terjadinya

Sumber: <https://bit.ly/icw-ungkap-korupsi>
(Indonesia Corruption Watch (2021))

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (Indonesia Corruption Watch, 2021), dari 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum, sebanyak 52 kasus atau 21,7% di antaranya secara spesifik berkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menjadikannya jenis penyimpangan yang paling banyak terjadi di sektor pendidikan. Sekolah menjadi instansi yang paling dominan terlibat, dengan 37 dari 75 kasus korupsi di level sekolah (49%) terkait langsung dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS. Keterlibatan Dinas Pendidikan turut memperparah kerentanan ini, tercermin dari 124 kasus korupsi (51,6%) yang terjadi di level dinas dengan kerugian negara mencapai Rp225,2 miliar, mencakup modus markup anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), serta pungutan liar atau pemerasan (12,6%) modus-modus yang juga kerap mewarnai penyaluran dan pengawasan dana BOS di daerah.

Fraud terjadi di hampir seluruh fase pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, dengan keterlibatan sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah yang secara kolektif menciptakan celah kontrol dan peluang kecurangan (Melati & Rodiah, 2022). Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), yang menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI, 2024) tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kasus penyalahgunaan dana BOS cukup tinggi di tingkat daerah. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat berupa menurunnya literasi siswa akibat ketiadaan buku dan bahan ajar, kurangnya fasilitas fisik sekolah, serta tidak terbayarnya honorarium tenaga pendidikan non-ASN. Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (2023) menyebutkan bahwa kelemahan pengawasan internal dan rendahnya kompetensi pengelola keuangan sekolah menjadi faktor utama yang memperparah kerentanan wilayah ini terhadap fraud.

Penelitian ini menyoroti empat faktor yang diyakini berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, yaitu Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang secara umum konsisten namun juga memuat sejumlah temuan yang tidak sejalan. Good Governance terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud (Inawati & Sabila, 2021; Handayani et al., 2024), namun Lubis et al. (2024) menemukan bahwa efektivitasnya tidak signifikan tanpa diiringi pengawasan internal yang kuat. Fraud Audit Proaktif terbukti berpengaruh signifikan dalam mendeteksi red flags (Rohmatin et al., 2021), tetapi efektivitasnya bergantung pada kompetensi dan independensi auditor (Lubis et al., 2024). Sistem Whistleblowing yang efektif terbukti menekan fraud (Jayanti & Suardana, 2023; Maulida & Bayunitri, 2021; Shonhadji & Maulidi, 2024), namun tidak berpengaruh signifikan tanpa jaminan kerahasiaan pelapor yang memadai (Sujana et al., 2020). Kompetensi SDM juga menunjukkan pola serupa, berpengaruh positif pada sejumlah studi (Inawati & Sabila, 2021; Jayanti & Suardana, 2023), namun tidak cukup tanpa pengendalian internal dan budaya organisasi yang berintegritas (Zeyn & Yunus, 2025; Nasution et al., 2026).

Dukungan terhadap keempat variabel tersebut juga diperkuat oleh sejumlah kajian pada konteks yang lebih luas. Pada level pengembangan alat deteksi, Afriyie et al. (2022) menegaskan peran akuntansi forensik sebagai pendekatan yang relevan dalam mendeteksi dan mencegah fraud. Dalam konteks pemerintah desa, Basri et al. (2021) serta Kurniawan & Rahardjo (2024) menggunakan perspektif fraud pentagon dan menemukan bahwa sistem whistleblowing, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur desa secara konsisten menjadi determinan penting pencegahan fraud. Efektivitas kombinasi tata kelola perusahaan dan sistem whistleblowing dalam mendorong pengungkapan fraud juga dibuktikan oleh Handajani et al. (2023), sementara peran audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud ditegaskan oleh Handoyo & Bayunitri (2021), Nugroho et al. (2023), dan Supriadi et al. (2024). Herawaty & Hernando (2020) menambahkan bahwa penguatan pengendalian internal atas prinsip good corporate governance turut berkontribusi terhadap pencegahan fraud di lingkup pemerintah daerah. Khusus dalam konteks pengelolaan dana BOS, Ramadhani et al. (2022) dan Prajanti et al. (2024) membuktikan bahwa kesadaran anti-fraud, pengendalian internal, budaya organisasi, dan sistem whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana sekolah, sedangkan Rahman et al. (2023) menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif (collaborative governance) antar pemangku kepentingan sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap): mayoritas penelitian terdahulu menguji variabel secara terpisah atau hanya menggabungkan dua hingga tiga variabel, namun umumnya dilakukan di wilayah perkotaan atau daerah dengan tata kelola yang relatif lebih baik. Belum terdapat studi yang secara komprehensif menguji pengaruh keempat variabel tersebut secara simultan maupun parsial dalam konteks spesifik pengelolaan dana BOS di daerah terpencil seperti Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, baik secara parsial maupun simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan hypothesis testing untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen meliputi Good Governance (X1), Fraud Audit Proaktif (X2), Sistem Whistleblowing (X3), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4), sedangkan variabel dependennya adalah Pencegahan Fraud (Y). Lokasi penelitian adalah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan kasus penyalahgunaan dana BOS yang cukup tinggi di sektor pendidikan.

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS pada 12 sekolah dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling yang bersifat sensus (total sampling), dengan kriteria responden meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah pada setiap sekolah, sehingga diperoleh 48 responden (4 responden × 12 sekolah). Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Sebelum disebarkan, instrumen terlebih dahulu diuji coba (try-out) kepada 20 mahasiswa mata kuliah Auditing sebagai responden uji coba untuk memastikan kejelasan bahasa dan kesesuaian indikator.

Variabel Pencegahan Fraud diukur melalui indikator efektivitas kontrol internal, transparansi pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur mengacu pada kerangka ACFE dan COSO. Good Governance diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Fraud Audit Proaktif diukur melalui indikator deteksi dini red flags, pemeriksaan rutin, dan keberadaan tim audit independen. Sistem Whistleblowing diukur melalui kejelasan saluran pelaporan, perlindungan pelapor, dan kecepatan tindak lanjut laporan. Kompetensi SDM diukur melalui pemahaman petunjuk teknis (juknis) BOS, kemampuan mengoperasikan sistem informasi seperti Dapodik dan ARKAS, integritas, etika, dan riwayat pelatihan.

Data dianalisis menggunakan SPSS versi 29 melalui tahapan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (Adjusted R²), serta pengujian hipotesis melalui uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada taraf signifikansi 5%. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

dengan Y = Pencegahan Fraud; X1 = Good Governance; X2 = Fraud Audit Proaktif; X3 = Sistem Whistleblowing; X4 = Kompetensi SDM; α = konstanta; β_1 – β_4 = koefisien regresi; dan ε = nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kuesioner disebarkan kepada 48 responden pada 12 sekolah dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan tingkat pengembalian sebesar 100% (48 kuesioner kembali dan seluruhnya dapat diolah). Responden terdiri atas empat kelompok jabatan yang masing-masing berjumlah 12 orang (25%): Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah. Berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki berjumlah 27 orang (56,3%) dan perempuan 21 orang (43,7%). Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden berpendidikan S1 (68,8%), diikuti S2/S3 (16,7%) dan D3 (14,6%). Berdasarkan lamanya menjabat sebagai pengelola dana BOS, kelompok terbanyak berada pada rentang lebih dari 3 tahun (35,4%).

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Y – Pencegahan Fraud	48	12	20	15,54	1,935
X1 – Good Governance	48	15	25	19,23	2,636
X2 – Fraud Audit Proaktif	48	9	15	11,65	1,422
X3 – Sistem Whistleblowing	48	11	20	15,48	2,297
X4 – Kompetensi SDM	48	11	20	15,38	2,209

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Seluruh variabel penelitian memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, yang mengindikasikan bahwa sebaran data tergolong baik dengan tingkat penyimpangan yang relatif rendah.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan skor masing-masing item pernyataan terhadap skor total konstruk variabelnya, dengan kriteria valid apabila r hitung $>$ r tabel (0,284 pada $n=48$, $df=46$, taraf signifikansi 5%).

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r hitung	r tabel	Keterangan
Pencegahan Fraud (Y)	4	0,792 – 0,865	0,284	Valid
Good Governance (X1)	5	0,585 – 0,756	0,284	Valid
Fraud Audit Proaktif (X2)	3	0,715 – 0,789	0,284	Valid
Sistem Whistleblowing (X3)	4	0,602 – 0,712	0,284	Valid
Kompetensi SDM (X4)	4	0,658 – 0,717	0,284	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Seluruh item pernyataan pada kelima variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pencegahan Fraud (Y)	0,856	Reliabel
Good Governance (X1)	0,901	Reliabel
Fraud Audit Proaktif (X2)	0,857	Reliabel
Sistem Whistleblowing (X3)	0,884	Reliabel
Kompetensi SDM (X4)	0,897	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel berada di atas 0,60, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan data yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga residual model dinyatakan terdistribusi normal.

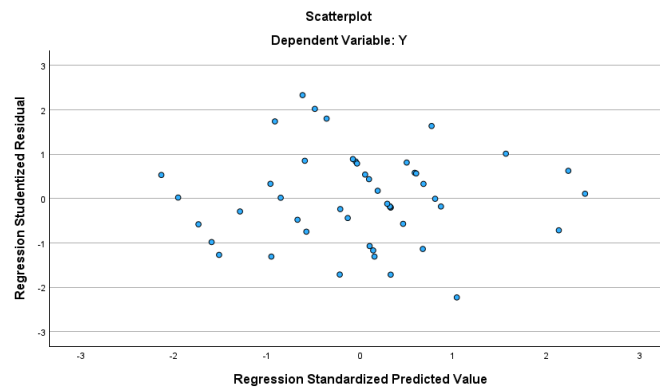
Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh nilai Tolerance $>$ 0,10 dan nilai VIF $<$ 10 untuk keempat variabel independen, sehingga tidak terjadi gejala multikolinearitas antarvariabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Good Governance (X1)	0,504	1,983
Fraud Audit Proaktif (X2)	0,554	1,803
Sistem Whistleblowing (X3)	0,507	1,972
Kompetensi SDM (X4)	0,442	2,262

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui grafik scatterplot antara nilai prediksi (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Hasil menunjukkan titik-titik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu di atas maupun di bawah angka 0, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	-0,422	0,912	-	-0,463	0,646
Good Governance (X1)	0,327	0,054	0,445	6,072	<0,001
Fraud Audit Proaktif (X2)	0,397	0,095	0,292	4,171	<0,001
Sistem Whistleblowing (X3)	0,157	0,062	0,187	2,554	0,014
Kompetensi SDM (X4)	0,170	0,069	0,195	2,485	0,017

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi: Pencegahan Fraud = $-0,422 + 0,327(\text{Good Governance}) + 0,397(\text{Fraud Audit Proaktif}) + 0,157(\text{Sistem Whistleblowing}) + 0,170(\text{Kompetensi SDM}) + e$. Nilai koefisien regresi yang positif pada seluruh variabel independen menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel tersebut diprediksi akan meningkatkan pencegahan fraud, dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap Pencegahan Fraud. Dengan $df = n - k - 1 = 48 - 4 - 1 = 43$ pada taraf signifikansi 5% (uji dua arah), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,016. Kriteria pengujian menyatakan H_a diterima apabila nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. $<$ 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Good Governance (X1)	6,072	2,016	<0,001	H1 diterima (positif signifikan)
Fraud Audit Proaktif (X2)	4,171	2,016	<0,001	H2 diterima (positif signifikan)
Sistem Whistleblowing (X3)	2,554	2,016	0,014	H3 diterima (positif signifikan)
Kompetensi SDM (X4)	2,485	2,016	0,017	H4 diterima (positif signifikan)

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Seluruh nilai t hitung variabel independen (Good Governance = 6,072; Fraud Audit Proaktif = 4,171; Sistem Whistleblowing = 2,554; Kompetensi SDM = 2,485) lebih besar daripada t tabel (2,016) dengan nilai Sig. $<$ 0,05, sehingga H1, H2, H3, dan H4 diterima. Artinya, Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi SDM secara parsial masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana BOS.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	155,404	4	38,851	81,441	<0,001
Residual	20,513	43	0,477	-	-
Total	175,917	47	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Nilai F hitung sebesar 81,441 dengan signifikansi <0,001 (<0,05) menunjukkan bahwa Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, sehingga model regresi yang digunakan dinyatakan layak (fit).

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,940	0,883	0,873	0,691

Sumber: Data primer yang diolah, 2026 (SPSS 29)

Nilai R sebesar 0,940 menunjukkan tingkat korelasi yang sangat kuat antara keempat variabel independen dengan Pencegahan Fraud. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,873 menunjukkan bahwa 87,3% variasi Pencegahan Fraud dapat dijelaskan oleh Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi SDM, sedangkan sisanya 12,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti budaya organisasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), moralitas individu, dan penegakan hukum.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil uji t menunjukkan bahwa Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Sig. <0,001 < 0,05), sehingga H1 diterima. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah menutup celah yang berpotensi disalahgunakan, sehingga dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Temuan ini sejalan dengan Putri et al. (2024), Inawati & Sabila (2021), dan Rohmatin et al. (2021) yang membuktikan bahwa penguatan tata kelola secara konsisten menekan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Fraud Audit Proaktif juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Sig. <0,001 < 0,05), sehingga H2 diterima. Pendekatan audit yang menitikberatkan pada deteksi dini red flags melalui pemeriksaan rutin dan verifikasi laporan penggunaan dana memungkinkan potensi kecurangan segera diketahui dan dicegah sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar, sejalan dengan temuan Agustiawan et al. (2024) dan Nadirsyah et al. (2024). Meski demikian, Lubis et al. (2024) mengingatkan bahwa efektivitas audit proaktif tetap bergantung pada kompetensi dan independensi auditor yang melaksanakannya.

Sistem Whistleblowing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Sig. 0,014 < 0,05), sehingga H3 diterima. Ketersediaan saluran pelaporan yang aman memberi ruang bagi guru, staf, orang tua, maupun komite sekolah untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut akan pembalasan, sehingga meningkatkan risiko terdeteksinya kecurangan. Hasil ini konsisten dengan Maulida & Bayunitri (2021), Periansya et al. (2023), dan Shonhadji & Maulidi (2024).

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Sig. 0,017 < 0,05), sehingga H4 diterima. Pemahaman yang memadai terhadap petunjuk teknis BOS, kemampuan mengoperasikan sistem informasi seperti Dapodik dan ARKAS, serta integritas dan etika pengelola meningkatkan kepekaan terhadap indikasi penyimpangan. Temuan ini sejalan dengan Jayanti & Suardana (2023), Sabrida et al. (2021), dan Wahyudi et al. (2021).

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud (Sig. <0,001 < 0,05), sehingga H5 diterima. Keempat variabel saling melengkapi: tata kelola yang baik membangun kerangka aturan dan pengawasan, audit proaktif mendeteksi penyimpangan sejak dini, sistem whistleblowing membuka jalur pelaporan yang aman, dan kompetensi SDM memastikan seluruh mekanisme tersebut dapat dijalankan secara tepat, sehingga celah terjadinya fraud dalam pengelolaan dana BOS menjadi semakin sempit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Good Governance, Fraud Audit Proaktif, Sistem Whistleblowing, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Penerapan prinsip Good Governance yang konsisten, pelaksanaan Fraud Audit Proaktif secara rutin, ketersediaan Sistem Whistleblowing yang aman, serta peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola dana BOS terbukti mampu menekan potensi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut. Secara simultan, keempat variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan kemampuan model menjelaskan 87,3% variasi Pencegahan Fraud.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah sampel yang relatif kecil (48 responden dari 12 SD) sehingga hasil belum dapat digeneralisasi secara luas, penggunaan hanya empat variabel independen, data yang bersifat self-report melalui kuesioner yang berpotensi bias persepsi, serta desain penelitian yang bersifat cross-sectional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan wilayah penelitian, menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), moralitas individu, atau penegakan hukum, serta mempertimbangkan pendekatan mixed method. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya disarankan terus mendorong penguatan Good Governance, pelaksanaan Fraud Audit Proaktif secara berkala, optimalisasi Sistem Whistleblowing yang mudah diakses dan terjamin kerahasiaannya, serta peningkatan Kompetensi SDM pengelola dana BOS secara berkelanjutan.

KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi dua penulis. Giska Putri Utami selaku penulis pertama berperan dalam perancangan penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, serta penulisan naskah. Tutut Dewi Astuti selaku dosen pembimbing dan penulis kedua berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, pengarahannya metodologi, supervisi selama proses penelitian, serta review dan penyempurnaan substansi naskah sebelum dipublikasikan. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir yang dipublikasikan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini. Sponsor pendanaan tidak memiliki peran dalam desain penelitian; dalam pengumpulan, analisis, atau interpretasi data; dalam penulisan naskah; maupun dalam keputusan untuk mempublikasikan hasilnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah pada 12 Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah bersedia menjadi responden dan mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE Indonesia. (2025). Survei Fraud Indonesia 2025. Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter. <https://acfe-indonesia.or.id/survey-fraud-indonesia-2025/>

- Afriyie, S. O., Akomeah, M. O., Amoakohene, G., Ampimah, B. C., Ocloo, C. E., & Kyei, M. O. (2022). Forensic accounting: A novel paradigm and relevant knowledge in fraud detection and prevention. *International Journal of Public Administration*, 46(9), 615–624. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2009855>
- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Al Azhar. (2021). Determinants of fraud in the village government: The pentagon's fraud perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173–187. <https://jurnal.usk.ac.id/JAROE/article/view/21037>
- BPK RI. (2024). Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Efunniyi, C. P., Abhulimen, A. O., Obiki-Osafiele, A. N., Osundare, O. S., Agu, E. E., & Adeniran, I. A. (2024). Strengthening corporate governance and financial compliance: Enhancing accountability and transparency. *Finance & Accounting Research Journal*, 6(8), 1597–1616. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509>
- Guntur Samudra, & Tutut Dewi Astuti. (2025). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 875–882. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i3.8812>
- Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2023). The effectiveness of corporate governance and whistleblowing system on fraud disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 29–44. <https://doi.org/10.24843/jiab.2023.v18.i01.p03>
- Handayani, D. N., Herianti, E., & Priharta, A. (2024). Pengaruh Good Governance, Fraud Audit dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 6130–6151.
- Handoyo, B. R. M., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64.
- Herawaty, N., & Hernando, R. (2020). Analysis of internal control of good corporate governance and fraud prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 4(2), 103–118.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Pendidikan di tengah kepungan korupsi. Indonesia Corruption Watch
- Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Laporan hasil pengawasan internal atas pengelolaan keuangan sekolah tahun 2023. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Jayanti, & Suardana. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Kurniawan, R. H., & Rahardjo, S. N. (2024). Determinants of fraud in the village government: Testing whistleblowing systems, internal control systems, village apparatus competencies. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(4). <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i4.36914>
- Lubis, H. Z., Sari, M., Ramadhany, A. A., Ovami, D. C., & Brutu, I. R. (2024). Effect of Internal Audit, Internal Control, and Audit Quality on Fraud Prevention: Evidence from the Public Sector in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), 40–50. [https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.04](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.04)
- Maulida, & Bayunitri. (2021). The Influence of Whistleblowing System toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4). <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Melati R., & Rodiah, S. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, dan Pengendalian Internal (Studi Empiris pada Sekolah-Sekolah di Pekanbaru).
- Nadirsyah, Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing Fraud Prevention and Internal Control: The Key Role of Internal Audit in Public Sector Governance. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Nasution, M. Z., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2026). Organizational Commitment and Fraud Awareness on Fraud Prevention, with Forensic Accounting Skills as a Moderating Variable. *Jurnal Informasi, Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 43–54. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v14i1.4825>

- Nugroho, D. A., Sari, R., & Kuntadi, C. (2023). Factors affecting fraud prevention: Organizational culture, human resource competence and the role of the internal auditor. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 4(4), 627–636.
- Periansya, P., Dewata, E., Sopiyan, A. R., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, Fraud Prevention, and Fraud Awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 556–566. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)
- Prajanti, F. D., Hari, K. K., Sabrina, N., & Basuki, R. (2024). Kesadaran Anti-Fraud dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Economina*, 3(5), 608–623. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i5.1324>
- Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating Good Village Governance for Fraud Prevention in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 31(2), 455–468. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>
- Rahman, I. K., Adiputra, I. M. P., & Hasniasari, R. (2023). Collaborative governance in the management of school operational assistance funds: A case study in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2167089. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167089>
- Ramadhani, R. S., Lawita, N. F., & Anriva, D. H. (2022). The Factors Affecting Fraud Prevention in BOS Fund Management. *Economic Education Analysis Journal*, 11(2), 144–154. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v11i2.54135>
- Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The Role of Good Corporate Governance to Fraud Prevention: An Analysis Based on the Fraud Pentagon. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 280–294. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554>
- Sabrina, A., Br, T., & Bukit, R. B. (2021). The Influence of Internal Control System, Individual Morality, and HR Competency on Fraud Prevention with Good Governance as an Intervening Variable. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5, 122–131.
- Sari, N. K. I. Y., Sumadi, N. K., & Endra Lesmana Putra, N. M. (2023). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Penegakan Hukum terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Kerambitan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 278–289. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i3.3265>
- Shonhadji, & Maulidi. (2024). Fraud Prevention in the Indonesian Banking Sector using Anti-Fraud Strategy. *Banks and Bank Systems*. [https://doi.org/10.21511/bbs.19\(1\).2024.02](https://doi.org/10.21511/bbs.19(1).2024.02)
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing system, competence, morality, and internal control system against fraud prevention on village financial management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780.
- Supriadi, T., Tjakrawala, K., Suryadnyana, N. A., & Sjam, J. M. E. (2024). Fraud prevention in the public sector: The role of internal audit. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7(3), Article 2659. <https://doi.org/10.63278/jicrcr.vi.2659>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, Pengendalian Internal Sistem dan Whistleblowing System Penipuan Dana Desa. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684.
- Zeyn, E., & Yunus, F. F. (2025). The effect of good governance implementation and human resource competence on fraud prevention. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 17(2), 188–196. <https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.22077>